

Ketua H. Abdillah Naah, Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H., Wakil Ketua H. Kayan, S.H., Wakil Ketua Warib Andono, SE.

## Digitalisasi Digenjot, Sidoarjo Bidik PAD Naik dan Kecororan Nol

SIDOARJO-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kian serius mengoptimalkan transaksi daerah. Melalui evaluasi Championship TP2DD (Tim Percepatan dan Peningkatan Digitalisasi Daerah) 2025 dan peraian Championship TP2DD 2026, komitmen itu diarahkan untuk satu tujuan besar, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan celah kebocoran anggaran secara transparan dan terbuka.

SIDORING: Perawatan dari Satgas PPOD dari Kemendagri dan Kepala Bupat Sidoarjo Subandi, Sekda Bupati Ferry Aprizandi dan Kepala BPPD Sidoarjo Noor Roshad.

Menurutnya, sistem digital akan memudahkan pengawasan sebagai mengontrol akurasi pencatatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggaran dapat dijamin tercapai dan mengikat. PAD Sidoarjo secara berkala, ujar Subandi saat Himpun Level Meeting TP2DD di Pendopo Delta Wiswa, Senin (6/4).

Se mengoptimalkan capaian TP2DD Sidoarjo pada 2025 perlu dipaparkan. Di tingkat Jawa-Bali, Sidoarjo berhasil meraih peringkat kelima, masuk dalam kelompok kelangkaan. Hal ini menunjukkan urgensi untuk melakukan transformasi digital. Indeks Efisiensi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD) mencapai 85,5 persen, teringgi di Jawa Timur (Jatim).

Tak hanya itu, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo juga menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dan peringkat kelima nasional.

Menurut Subandi, memaksimalkan capaian tersebut bukan akhir. Ia ingin seluruh OPD semakin disiplin dalam memanfaatkan sistem digital, termasuk melalui dashboard monitoring pendapatan secara real time.

"Kalau kita bisa melihat, saya yakin semuanya yang diangkut pimpinan daerah akan berjalan, asalkan kita sama dan kolaborasi tetap terjaga," katanya.

Ke Halaman 10

## Pemkab Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas

Rombongan Kunjungan Luar Kota Dikurangi Separuh

SIDOARJO - Dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah bakal dikurangi lagi. Langkah efisiensi dilakukan Pemkab Sidoarjo untuk memotong beban anggaran perjalanan dinas. Salah satunya dengan memangkas anggaran perjalanan dinas.

"Kalau ini, anggaran perjalanan dinas untuk seluruh OPD dikurangkan 50 persen. Dana tersebut rencana akan digunakan untuk subsidi OPD di bidang kesehatan," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, Chusnul Inayah mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penyesuaian bersama OPD. Hal tersebut untuk memastikan anggaran 50 persen seluruh OPD diwajibkan mengoptimalkan efisiensi. "Kami sudah

Kami masih identifikasi mana yang bisa dipangkas dan mana yang tidak," katanya kemarin (6/4).

Pemangkasnya, memangkas seluruh komponen beban perjalanan dinas. Mulai paket meeting, transportasi, perjalanan dalam dan luar daerah, hingga hotel penginapan. "Semua anggaran dapat dipotong karena sebagian besar anggaran dana pusat," kata Chusnul. Memangkas anggaran yang berdampak pada Akomodasi (DAS) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tersebut. (DBH) HTI digunakan tidak bisa efisien. Sebaliknya, pemkab akan menambah fokusnya dalam subsidi kesehatan dan subsidi lainnya. Dia meminta agar Pemkab memusatkan hasil efisiensi dialokasikan ke program yang lebih berdampak. (ah/hen)

Ke Halaman 10

## Permudah Izin dan Bunga Ringan, Bupati Dorong 250 Ribu UMKM

KOTA-Usaha menggerakkan ekonomi lokal terus dipacu. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kemudahan perizinan hingga optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program lainnya.

Menurutnya, sektor UMKM yang jumlahnya mencapai sekitar 250 ribu di Sidoarjo memiliki potensi besar sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, berbagai kebijakan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan daya saing pelaku usaha.

"Penguatan UMKM harus menjadi perhatian kita bersama. Perwujudan perzinahan dan penguatan pendampingan berjalan dengan baik," ujar Subandi, Senin (6/4).

Ia mengatakan, proses perzinahan bagi pelaku usaha yang ingin mengakses KUR harus dipercepat dan disederhanakan, termasuk melalui peran BPR Delta Artha sebagai mitra pendamping. Tidak hanya itu, pendampingan juga menjadi kunci agar program subsidi bunga benar-benar tepat sasaran.

"Terutama optimalisasi subsidi bunga KUR 0,2 persen agar tepat sasaran," tambahnya.

Dalam kebijakan terbaru, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025, suku bunga KUR diatapkan hanya 2 persen per tahun atau sekitar 0,16 persen per bulan. Kebijakan tersebut merupakan hasil subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mencapai delapan dengan plafon hingga Rp 50 juta. Bahkan, untuk pinjaman Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, fasilitas kredit diberikan tanpa agunan.

Selain kemudahan akses pembiayaan, Subandi juga

BERKUALITAS: UMKM petani tahu di Sidoarjo menjadi salah satu penggerak perekonomian.

Ke Halaman 10

## ASN tetap harus merespons panggilan atasan dan menjalankan tugas seperti biasa.

Benny Airiangga Yogaswara Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sidoarjo

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo bakal memberikan sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak merespons panggilan atasan saat menjalankan Work From Home (WFH). Tidak saja kena tegur, ASN juga berpotensi mendapat penurunan tunjangan dan jabatan jika terbukti melanggarkan aturan.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sidoarjo Benny Airiangga Yogaswara mengatakan bahwa ASN tetap wajib siaga dan responsif

selama jam kerja. Baginya WFH tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tugas maupun komunikasi dengan pimpinan. "ASN tetap harus merespons panggilan atasan dan menjalankan tugas seperti biasa," katanya, kemarin (6/4).

Menurutnya, penerapan sanksi mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN. Terdapat tiga kategori sanksi bagi ASN yang melanggar. Mulai dari hukuman ringan hingga berat. (ah/hen)

## Setahun, 20 Penutup Saluran Raib Dicuri

SIDOARJO - Pencurian penutup saluran air dari besi kembali terjadi di Kota Delta. Kali ini, maling menyasar penutup gorong-gorong di Frontage Road (FR) Gedangan situ depan Perumahan Bumi Surya Jaya. Pemkab berkoordinasi dengan polisi untuk mencari siapa pelaku pencurian.

Dari data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, aksi pencurian tak sekecil itu saja. Sepanjang 2025, ada 20 penutup gorong-gorong di akses menuju Bandara Juanda yang dicuri. Pihaknya belum tertangkap.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo M. Mahmud mengatakan, pihaknya akan segera melakukan penuntasan terhadap gorong-gorong yang terbuka. "Dalam waktu dekat akan ditanyai karena masih banyak pengrusakan jalan," paparnya kemarin (6/4).

Mahmud mengatakan, insidensi masih memang berat. Jumlah penutup saluran yang dicuri. Dari laporan sementara baru satu yang dilaporkan hilang. "Kami akan coba cek mana lagi titik di FR yang tutup gorong-gorongnya hilang," pungkasnya. (ez/hen)

## KILAS DEWAN

### Bupati Sidoarjo Ucapkan Selamat atas Muscab PKB

Sidoarjo, Bhirawa  
Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan selamat atas tercalonnya Muscab PKB Sidoarjo tahun 2026, Sabtu (4/4) akhir pekan lalu, yang digelar di Five Hotel Sidoarjo.

Sebagai kepala bidan dirinya sangat mendukung, semoga berkah dan lancar. Karena harus diakui PKB di Kabupaten Sidoarjo, termasuk kekuatan politik yang strategis untuk mengawal jalannya pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

"Semoga Muscab PKB tahun 2026 ini dapat sebagai sarana sinergitas, antara Partai dan Pemerintah, untuk membangun Kabupaten Sidoarjo semakin maju," komentarnya, Senin (6/4) kemarin.

Menurutnya dalam acara Muscab PKB ini, tidak hanya sekedar memilih calon pemimpin PKB Sidoarjo di lingkungan internal saja, tetapi juga harus bisa melahirkan calon calon pemimpin, yang punya visi dan misi yang besar untuk mem-

## MITRA

### Senang Banyak Siswa Rasakan Manfaat MBG

KEPALA Dikbud Kabupaten Sidoarjo, Dr. Tiro Adi, mengatakan sampai saat ini sudah terdapat 117 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPG) yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Ke depan, jumlah tersebut diharapkan akan bisa terus bertambah agar semakin banyak siswa di Kabupaten Sidoarjo yang dapat mera-

## Permohonan Surat Domisili Melonjak setelah Lebaran

Rata-Rata Per Hari 61 Orang

SIDOARJO - Angka migrasi penduduk di Kota Delta meningkat pasca Lebaran. Hal tersebut di melonjaknya masyarakat yang mengurus surat keterangan pindah (SKP) dan surat keterangan datang (SKD) atau surat domisili.

Lonjakan terjadi dalam kurun waktu 25 Maret hingga 1 April. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 211 jiwa mengurus SKP untuk pindah ke luar daerah. Sedangkan SKD ada 219 orang yang mengurus.

Kepala Dikbud Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, jumlah warga yang mengurus dokumen pindah dan datang meningkat karena libur Lebaran. Jumlahnya naik menjadi 61 orang per hari setelah Lebaran.

"Untuk yang datang kami lebih selektif. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi," kata Reddy. Menurutnya, salah satu syarat untuk pengurusan SKD baik kontrak atau kos harus ada surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah untuk digunakan alimahnya sebagai domisili.

Reddy menjelaskan, layanan pengurusan dokumen dapat dilakukan melalui berbagai kanal, baik secara daring maupun langsung. Menurut dia, pengurusan SKD dan SKP paling agar pemerintah bisa tepat sasaran dalam memberikan bantuan. (ez/hen)

LAYANAN KEPENDUDUKAN: Petugas Dikbud Sidoarjo melayani masyarakat yang mengurus surat domisili melalui aplikasi.

Ke Halaman 10



## Satpol PP dan Bea Cukai Gelar Operasi Bersama

Amankan Pelabuhan Ribes Bataung Rokok ilegal

Dalam upaya mengamankan perdagangan ilegal di pelabuhan Kabupaten Sidoarjo, Satuan Tugas (Satgus) Operasi Bersama Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dan Bea Cukai Sidoarjo menggelar operasi gabungan di Pelabuhan Ribes Bataung, Kecamatan Bataung, Kabupaten Sidoarjo, pada Sabtu (4/4) kemarin.

Operasi gabungan ini bertujuan untuk mengamankan perdagangan ilegal, khususnya rokok ilegal, yang masuk ke wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Operasi gabungan ini melibatkan 112 personel Satpol PP Kabupaten Sidoarjo dan 12 personel Bea Cukai Sidoarjo.

Operasi gabungan ini berlangsung selama 2 jam dan berhasil mengamankan 100 kg rokok ilegal.

Ke Halaman 10

## TKA di Dua Sekolah Digabung karena Belum Terakreditasi

193 SMP Sederajat Gelar Tes Kemarin

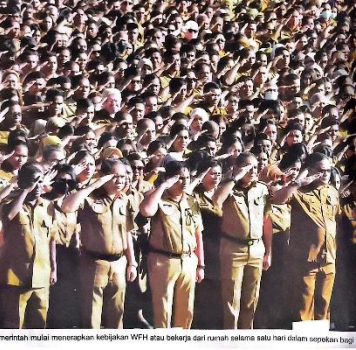
SIDOARJO - Sebanyak 193 SMP sederajat di swasta di Kota Delta menggelar Tes Kemampuan Akademik (TKA) kemarin (6/4). Dari jumlah tersebut, ada dua sekolah yang pelaksanaan TKA-nya digabung. Keduanya di Tiro dan Tanyong. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tiro Adi mengatakan, total ada 48 SMP negeri dan 145 SMP swasta yang mengikuti TKA tahun ini. Tiro memantapkan pelaksanaan berjalan lancar di hari pertama.

"Dari pengecekan di SMPN 1 Candi dan SMP PGRI 10 Candi, sarpras dan siswa tampak siap," ujarnya.

Pada hari pertama, saat pelajaran yang ditujikan yaitu matematika dan surnel bahasa Indonesia dan surnel bahasa Inggris. Pelaksanaan TKA ini berlangsung dua hari. Namun kali ini mayoritas siswa bisa diselesaikan. Sebanyak 327 siswa mengikuti TKA di sekolahnya. Sebagian ada kendala kecil terkait zona pengawas yang butuh waktu lama untuk login. "Tapi langsung teratasi dan pelaksanaan berjalan lancar," ujar Tiro. (ez/hen)

Sempat Terkendala Zoom  
Tiro menambahkan, bagi sekolah yang belum terakreditasi, pelaksanaan TKA akan digabung dengan sekolah yang sudah terakreditasi.

Ke Halaman 10



## WFH 1 Hari untuk ASN Mulai Diterapkan Pekan Ini

Pemerintah Disarankan Rutin Evaluasi Kebijakan

Mendikti: PJJ dan WFH Disonor Kualitas Belajar

Jakarta-BERITA BANGSA - Pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan kebijakan WFH (Work From Home) satu hari untuk ASN mulai Senin (7/4) 2025, bersamaan era baru dalam bekerja berupa masa kerja fleksibel. Kebijakan ini merupakan respons pemerintah terhadap berbagai tantangan, termasuk perubahan gaya kerja masyarakat di tengah pandemi. Pelaksanaan WFH akan dilaksanakan secara bertahap.

Ke Halaman 10

## EKONOMI

Masyarakat saat antri membeli BBM subsidi di SPBU

Pemerintah Tunggu Waktu yang Tepat Harga BBM Subsidi Belum Naik

Jakarta-HARIAN BANGSA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah krisis energi global dinilai pengamat politik. Nurul Fatta menilai muatan politik.

Ke Halaman 10

## Pemkab Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas

ANGGARAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2026

Perjalanan dinas awalnya dialokasikan Rp 90 miliar

Ada kebijakan pemangkasan 50 persen

Pemangkasan berlaku untuk semua OPD

Pengurangan juga berlaku untuk perjalanan luar negeri

### Rombongan Kunjungan Luar Kota Dikurangi Separuh

SIDOARJO – Dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah bakal dikurangi lagi. Langkah efisiensi dilakukan Pemkab Sidoarjo untuk menutupi kekurangan anggaran belanja. Salah satunya dengan memangkas anggaran perjalanan dinas.

Tahun ini, anggaran perjalanan dinas untuk seluruh OPD dialokasikan Rp 90 miliar. Dana tersebut rencana akan dipangkas 50 persen. Seluruh OPD di Pemkab masih menyusun mana saja kegiatan yang dikurangi anggarannya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, Chusnul Inayah mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyesuaian bersama OPD. Hal tersebut untuk menentukan komponen anggaran yang berpotensi masuk skema efisiensi. "Kami masih



Kami masih identifikasi mana yang bisa dipangkas dan mana yang tidak."

Chusnul Inayah  
Kepala BPKAD Sidoarjo

identifikasi mana yang bisa dipangkas dan mana yang tidak," katanya kemarin (6/4).

Pemangkasan menyangkut seluruh komponen belanja perjalanan dinas. Mulai paket meeting, transportasi, perjalanan dalam dan luar daerah, hingga luar negeri. "Tidak semua anggaran dapat dipotong karena sebagian bersumber dana pusat," kata Chusnul. Komponen anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dipastikan tidak kena efisiensi.

Sebaliknya, Pemkab akan membatasi frekuensi perjalanan dinas ASN. Jumlah rombongan dalam setiap kegiatan dikurangi 50 persen. Seluruh OPD diwajibkan mengikuti peraturan terkait efisiensi.

### DPRD

#### Dukung Efisiensi

Sekretaris Komisi B DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan menilai bahwa kebijakan tersebut sebagai langkah rasional. Efisiensi diperlukan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah yang besar. "Namun, pengurangan jangan sampai menghilangkan kegiatan sepenuhnya," ujarnya.

DPRD dari fraksi PKB tersebut menegaskan, pemangkasan perjalanan dinas luar negeri sudah tepat. Hal tersebut cukup efektif untuk menekan belanja yang tidak prioritas. Dia meminta agar Pemkab memastikan hasil efisiensi dialihkan ke program yang lebih berdampak. (ful/hen)

Sumber: Pemkab Sidoarjo

# Jawa Pos



“ASN tetap harus merespons panggilan atasan dan menjalankan tugas seperti biasa.”

**Benny Airlangga Yogaswara**  
Asisten III Bidang Administrasi Umum  
Setda Sidoarjo

## Tak Respons Panggilan Atasan saat WFH, ASN Bakal Disanksi

**SIDOARJO** - Pemkab Sidoarjo bakal memberikan sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak merespons panggilan atasan saat menjalankan Work From Home (WFH). Tidak saja kena tegur, ASN juga berpotensi mendapat penurunan tunjangan dan jabatan jika terbukti melakukan pelanggaran aturan.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara mengatakan bahwa ASN tetap wajib siaga dan responsif

selama jam kerja. Baginya WFH tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tugas maupun komunikasi dengan pimpinan. "ASN tetap harus merespons panggilan atasan dan menjalankan tugas seperti biasa," katanya, kemarin (6/4).

Menurutnya, penerapan sanksi mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang kedisiplinan ASN. Terdapat tiga kategori sanksi bagi ASN yang melanggar. Mulai dari hukuman ringan hingga berat. (**ful/hen**)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Permohonan Surat Domisili Melonjak setelah Lebaran

Rata-Rata Per  
Hari 61 Orang

**SIDOARJO** - Angka migrasi penduduk di Kota Delta meningkat pasca Lebaran. Itu terlihat dari melonjaknya masyarakat yang mengurus surat keterangan pindah (SKP) dan surat keterangan datang (SKD) atau surat domisili. Lonjakan terjadi dalam kurun waktu 25 Maret hingga 1 April. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 211 jiwa mengurus SKP untuk pindah ke luar daerah. Se-

dangkan SKD ada 219 orang yang mengurus.

Kepala Disdukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, jumlah warga yang mengurus dokumen pindah dan datang rata-rata hanya 14 orang pada hari biasa. Jumlahnya naik menjadi 61 orang per hari setelah Lebaran.

"Untuk yang datang kami lebih selektif. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi," kata Reddy. Menurutnya, salah satu syarat untuk pengurusan SKD baik kontrak atau kos harus ada surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik

rumah untuk digunakan alamatnya sebagai domisili.

Reddy menjelaskan, layanan pengurusan dokumen dapat dilakukan melalui berbagai kanal, baik secara daring maupun langsung. Menurut dia, pengurusan SKD dan SKP penting agar pemerintah bisa tepat sasaran dalam memberikan bantuan. (eza/hen)

**LAYANAN KEPENDUDUKAN:**  
Petugas Disdukcapil Sidoarjo melayani masyarakat yang mengurus surat domisili kemarin (6/4). Permohonan dokumen naik setelah Idul Fitri.



# Jawa Pos



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**HILANG:** Saluran tanpa penutup di Frontage Road Gedangan bisa memicu kecelakaan.

## Setahun, 20 Penutup Saluran Raib Dicuri

**SIDOARJO** – Pencurian penutup saluran air dari besi kembali terjadi di Kota Delta. Kali ini, maling menasar penutup gorong-gorong di *Frontage Road* (FR) Gedangan atau depan Perumahan Puri Surya Jaya. Pemkab berkoordinasi dengan polisi untuk mencari siapa pelaku pencurian.

Dari data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, aksi pencurian tak sekali terjadi. Sepanjang 2025, ada 20 penutup gorong-gorong di akses menuju Bandara Juanda yang dicuri. Pelakunya belum tertangkap.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo M. Makhmud mengatakan, pihaknya akan segera melakukan penanganan terhadap gorong-gorong yang terbuka. "Dalam waktu dekat akan ditutup karena membahayakan pengguna jalan," paparnya kemarin (6/4).

Makhmud mengatakan, instansinya masih mendata berapa jumlah penutup saluran yang dicuri. Dari laporan sementara baru satu yang dilaporkan hilang. "Kami akan coba cek mana lagi titik di FR yang tutup gorong-gorongnya hilang," pungkasnya. (eza/hen)

V

## SATPOL PP



SATPOL PP SIDOARJO

**LANGGAR ATURAN:** Petugas satpol PP bersama Bea dan Cukai Tipe Madya B Sidoarjo mendatangi penjual rokok ilegal di Jalan Raya Lingkar Timur, Minggu (5/4).

## Sita 30.520 Batang Rokok Ilegal dari 5 Pedagang

**SIDOARJO** – Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berhasil mengamankan sebanyak 30.520 batang rokok ilegal dari dua operasi gabungan di wilayah Kecamatan Candi dan Sidoarjo Kota pada awal bulan ini. Dari hasil penindakan tersebut, kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 20 juta.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Sidoarjo Puguh Kariyanto mengatakan, operasi digelar bersama Bea Cukai Tipe Madya B Sidoarjo dan Denpom dengan membagi tim menjadi dua wilayah. "Ada lima titik setidaknya yang kami sisir di dua kecamatan," paparnya.

Dari penyisiran, petugas menemukan tiga pedagang yang melanggar aturan di kawasan Bluru Kidul serta sepanjang Jalan Lingkar Timur Sidoarjo. Selain itu ditemukan dua lainnya di Ngampelsari dan Balonggabus, Candi. Dari tangan para pelanggar, diamankan ribuan batang rokok dari berbagai merek tanpa pita cukai resmi. (eza/hen)

# Jawa Pos

# TKA di Dua Sekolah Digabung karena Belum Terakreditasi

## 193 SMP Sederajat Gelar Tes Kemarin

**SIDOARJO** – Sebanyak 193 SMP negeri dan swasta di Kota Delta menggelar Tes Kemampuan Akademik (TKA) kemarin (6/4). Dari jumlah tersebut, ada dua sekolah yang pelaksanaan TKA-nya digabung. Keduanya di Tarik dan Taman.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tirta Adi mengatakan, total ada 48 SMP negeri dan 145 SMP swasta yang mengikuti TKA tahun ini. Tirta memastikan pelaksanaan berjalan lancar di hari pertama. "Dari pengecekan di SMPN 1 Candi dan SMP PGRI 10 Candi, sarpras dan siswa tampak siap," ujarnya.

Pada hari pertama, mata



ANGGER BONDAN/JAWA POS

**FOKUS:** Siswa SMP PGRI 10 Candi mengikuti TKA kemarin (6/4).

pelajaran yang diujikan yaitu matematika dan survei karakter. Kemudian pada hari kedua ujian pelajaran Bahasa Indonesia dan survei lingkungan. "Pelaksanaan hanya dua hari. Namun kalau muridnya banyak bisa disesuaikan jadwalnya," kata Tirta. Dia mengatakan pelaksanaan TKA susulan digelar hingga 16 April.

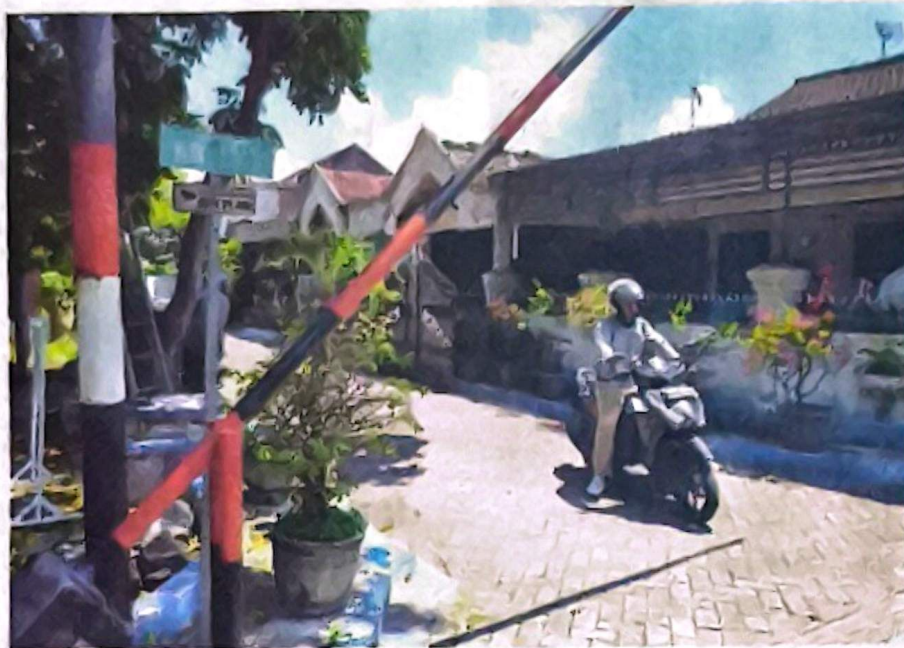
### Sempat Terkendala Zoom

Tirta menambahkan, bagi sekolah yang belum tera-

reditasi, pelaksanaan TKA harus digabungkan dengan sekolah lain. "Ada dua sekolah yang harus gabung tahun ini," katanya.

Ketua Panitia Penyelenggara TKA SMPN 1 Candi Titien Zudiyah Laily menyebutkan, sebanyak 327 siswa mengikuti TKA di sekolahnya. Sempat ada kendala kecil terkait zoom pengawas yang butuh waktu lama untuk login. "Tapi langsung teratasi dan pelaksanaan berjalan lancar," ujar Titien. (eza/hen)

# Jawa Pos



**JADI SOROTAN:** Mashuda dan portal yang sering ditutup.

## Viral Penutupan Portal di Sidokare

### ■ Pak Uda Tegaskan Demi Keselamatan Cucu

**VIRALNYA** pemasangan pembatas di Pondok Sidokare Asri Blok Y memicu pro dan kontra di media sosial. Namun di balik itu, pemilik rumah, Mashuda atau yang kerap disapa Pak Uda, menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan semata-mata demi keselamatan cucunya.

Peristiwa pemasangan pembatas jalan ini terjadi di kawasan

● Ke Halaman 10

## ✓ Viral Penutupan...

Pondok Sidokare Asri Blok Y, yang turut menjadi sorotan warganet.

Dalam video yang beredar luas, muncul berbagai cibiran dari netizen yang menilai Pak Uda telah menguasai jalan yang disebut sebagai fasilitas umum (fasum) serta melarang kendaraan melintas di depan rumahnya. Bahkan, sebagian komentar berkembang tidak relevan dan bernada merendahkan.

Menanggapi hal itu, Pak Uda yang merupakan purnawirawan sekaligus mantan ketua RT dan RW setempat meluruskan bahwa pemasangan pembatas tersebut bukan untuk menutup akses jalan, melainkan sebagai bentuk antisipasi demi keselamatan anak-anak, khususnya cucunya yang sering bermain di area tersebut.

"Saya berencana memasang rambu ini sebenarnya untuk keamanan anak-anak saat bermain dan

rencana saya akan saya beri tulisan hati-hati banyak anak kecil, berhubung masihbrepot belum sempat untuk menulis dan masih polos putih rambunya keduluan viral," ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi jalan di depan rumahnya kerap dilalui kendaraan yang melintas secara tiba-tiba tanpa peringatan, sehingga berpotensi membahayakan.

"Ini saya untuk antisipasi karna cucu saya biasanya tiba tiba nyebrang jalan,

demi keselamatannya jadi saya menutup jalan separuh" kata Pak Uda.

Menurutnya, pembatas tersebut tidak bersifat permanen dan tetap bisa dipindahkan sewaktu-waktu jika ada warga yang hendak melintas. Ia menegaskan bahwa akses jalan tetap terbuka selama ada komunikasi yang baik. "Lah kalau enggak ada kegiatan cucuku ya tak sampingkan" imbuhnya.

Pak Uda juga menekankan bahwa dirinya tidak pernah melarang warga

untuk lewat, melainkan hanya berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

"Kalau ada orang lewat ya silahkan lewat kalau pas rambu tersebut tertutup y biasanya di buka jalanya sama pengguna jalan saya tidak masalah," jelasnya.

Ia pun menyalahkan narasi yang berkembang di media sosial yang dinilai tidak utuh dan memicu kesalah pahaman di tengah masyarakat. (sur/vga)

## Permudah Izin dan Bunga Ringan, Bupati Dorong 250 Ribu UMKM

KOTA-Upaya menggerakkan ekonomi lokal terus dipacu. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kemudahan perizinan hingga optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) berbunga ringan.

Menurutnya, sektor UMKM yang jumlahnya mencapai sekitar 250 ribu di Sidoarjo memiliki potensi besar sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, berbagai kebijakan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan daya saing pelaku usaha.

"Penguatan UMKM harus menjadi perhatian kita bersama. Permudah perizinan dan pastikan pendampingan berjalan dengan baik," ujar Subandi, Senin (6/4).

Ia menekankan, proses perizinan bagi pelaku usaha yang ingin mengakses Kurda harus dipermudah dan dipercepat, termasuk melalui peran BPR Delta Artha sebagai lembaga penyalur. Tidak hanya itu, pendampingan juga menjadi kunci agar program subsidi bunga benar-benar tepat sasaran.

"Termasuk optimalisasi subsidi bunga Kurda 0,2 persen agar tepat sasaran," tambahnya.

Dalam kebijakan terbaru, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025, suku bunga Kurda ditetapkan hanya 2 persen per tahun atau sekitar 0,16 persen per bulan. Angka tersebut merupakan hasil subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mencapai delapan hingga sembilan persen.

Melalui program ini, pelaku UMKM dapat mengakses pinjaman dengan plafon hingga Rp 50 juta. Bahkan, untuk pinjaman Rp 5 juta hingga Rp 10 juta, fasilitas kredit diberikan tanpa agunan.

Selain kemudahan akses pembiayaan, Subandi juga



BERKUALITAS: UMKM perajin tahu di Sidoarjo menjadi salah satu penggerak perekonomian.

● Ke Halaman 10



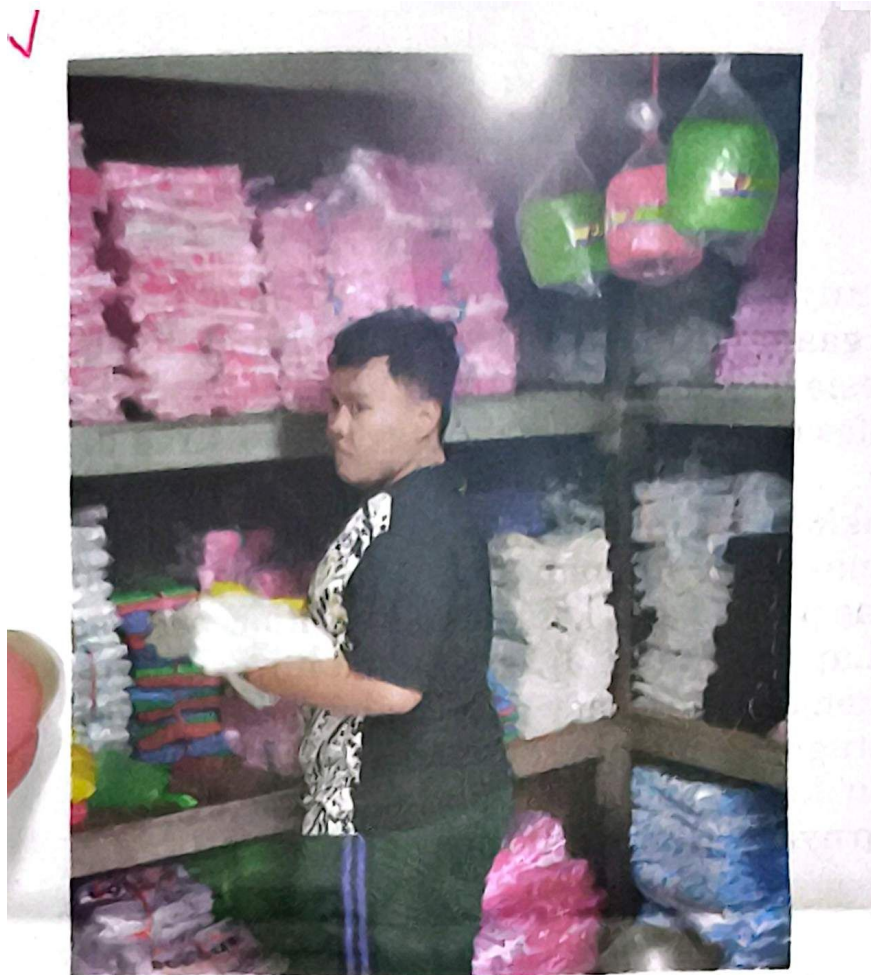
### Permudah Izin...

mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Transformasi digital dan penguatan branding dinilai penting agar

produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

"Percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama," tegasnya. (dik/vga)





DIKRY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

**MEROKET: Pedagang plastik di Pasar Larangan Sidoarjo saat sedang melayani pembeli.**

## Harga Plastik Meroket hingga 100 Persen

### ■ Gegara Perang Timur Tengah

LONJAKAN tajam harga plastik di Sidoarjo membuat pedagang menjerit. Kenaikan yang mencapai hingga 100 persen dalam beberapa pekan terakhir ini disebut-sebut dipicu dampak konflik di Timur Tengah antara Israel Vs Iran, yang berimbas pada pasokan bahan baku.

Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh para pedagang plastik di Pasar Larangan, Kecamatan Candi.

● Ke Halaman 10

#### ■ Harga Plastik Meroket...

Salah satunya Risky, 25, yang mengaku kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak menjelang Lebaran. "Kenaikan ini terjadi bertahap, dimulai dari Rp 18 ribu per kilogram saat Lebaran, naik ke Rp 23 ribu per kilogram kini melonjak

hari, naiknya bertahap, tapi naik terus sampai sekarang. Puncaknya saat Lebaran itu mencapai 50 persen naiknya. Imbas perang itu," ujar Risky ke Radar Sidoarjo, Senin (6/4). "Kondisi ini sangat menyakitkan, karena yang sebelumnya berada di Rp 23 ribu per kilogram kini melonjak

menjadi Rp 46 ribu per kilogram atau naik hingga 100 persen. Sementara itu, plastik tomat yang semula Rp 30 ribu per kilogram kini mencapai Rp 50 ribu per kilogram. "Kenaikan sekitar 67 persen ini terjadi pada kertas minyak. Dari

harga awal Rp 18 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 24 ribu per kilogram atau meningkat sekitar 33,33 persen. Menurut Risky, kenaikan ini tidak lepas dari kondisi pasokan yang libur masuk kembali baru Lebaran dan dampak perang di

Timur Tengah. Aktivitas produksi baru kembali berjalan pada 30 Maret 2026, sehingga pasokan sempat tersendat. "Ditambah pabrik-pabrik banyak yang libur masuk kembali baru Lebaran dan dampak perang di



## Satpol PP dan Bea Cukai Gelar Operasi Bersama

### Amankan Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal

Dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo bersama Bea Cukai Tipe Madya B Sidoarjo menggelar operasi bersama. Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 000.1.2.3/923/438.5.5/2026 hingga 000.1.2.3/926/438.5.5/2026 tentang pemberantasan rokok ilegal.

Suryanto, Wartawan Radar Sidoarjo

DALAM pelaksanaannya, tim dibagi menjadi dua kelompok. Operasi ini melibatkan total 40 personel, terdiri dari 34 anggota Satpol PP, 4 personel Bea Cukai, dan 2 personel Denpom. Hasil operasi menunjukkan sejumlah pelanggaran peredaran rokok ilegal



● Ke Halaman 10 TEGAS: Petugas gabungan saat operasi bersama pemberantasan rokok ilegal.



#### Satpol PP...

di beberapa titik. Petugas mengamankan berbagai merek rokok tanpa pita cukai dari lima pelanggar berbeda.

#### Permudah Izin...

mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Transformasi digital dan penguatan branding dinilai penting agar

Di antaranya, seorang yang berjualan di wilayah Bluru Kidul, Sidoarjo, kedapatan menyimpan 436 bungkus rokok ilegal atau setara 8.720 batang. Selain itu, di wilayah Rangkah Kidul,

produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

"Percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama," tegasnya. (dik/vga)

Sidoarjo, diamankan dengan barang bukti 217 bungkus (4.340 batang), serta Sudayat dengan 107 bungkus (2.140 batang) di lokasi yang sama.

Petugas juga mengamankan 369 bungkus rokok ilegal (7.380 batang) dari Samsul Arifin di wilayah Ngampel Sari, serta 397 bungkus (7.940 batang), dari Much. Riski Andriarno di wilayah Balong Gabus, Porong. Secara keseluruhan, total rokok ilegal yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut mencapai 30.520 batang.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Puguh Kariyanto, menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara.

"Operasi ini akan terus kami lakukan secara berkala sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku peredaran rokok ilegal.

Kami juga mengimbau masyarakat

untuk tidak memperjualbelikan maupun mengonsumsi rokok ilegal," ujar Puguh.

Ia menambahkan, sinergi antara Satpol PP, Bea Cukai, dan aparat lainnya diharapkan mampu mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar," tutup Puguh. (sur/vga)



### Digitalisasi Digenjot, Sidoarjo Bidik PAD Naik dan Kebocoran Nol



**INOVATIF:** Bupati Sidoarjo Subandi saat sambutan dalam High Level Meeting TP2DD di Pendopo Delta Wibawa.

**SIDOARJO**-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kian serius mempercepat digitalisasi transaksi daerah. Melalui evaluasi Championship TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) 2025 dan persiapan Championship TP2DD 2026, komitmen itu diarahkan untuk satu tujuan besar, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup celah kebocoran anggaran secara transparan dan terukur.



**SINERGIS:** Perwakilan dari Satgas P2DD dari Kemkenko Perekonomian bersama Bupati Sidoarjo Subandi, Sekda Sidoarjo Fenny Abridawati dan Kepala BPPD Sidoarjo Noer Rochmawati.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa transformasi transaksi non-tunai menjadi kunci utama penguatan keuangan daerah ke depan.

Menurutnya, sistem digital akan memudahkan pengawasan sekaligus meningkatkan akurasi pendapatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Anggaran dapat dijamin transparansi dan meningkatkan PAD Sidoarjo secara terukur," ujar Subandi saat High Level Meeting TP2DD di Pendopo Delta

Wibawa, Senin (6/4).  
Ia mengungkapkan, capaian TP2DD Sidoarjo pada 2025 patut diapresiasi. Di tingkat Jawa-Bali, Sidoarjo berhasil meraih peringkat ketiga, termasuk dalam kategori kelembagaan terbaik dan program unggulan terbaik nasional untuk Aplikasi My Retribusi. Bahkan, indeks Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mencapai 99,5 persen, tertinggi di Jawa Timur (Jatim).  
Tak hanya itu, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo juga menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dan peringkat keempat nasional.  
Namun, Subandi menekankan bahwa capaian tersebut bukan akhir. Ia ingin seluruh OPD semakin disiplin dalam memanfaatkan sistem digital, termasuk melalui dashboard monitoring pendapatan secara real time.  
"Kalau kita bisa melihat, saya yakin semuanya yang diinginkan pimpinan daerah akan berjalan, asalkan kerja sama dan kolaborasi tetap terjaga," tegasnya.

● Ke Halaman 10

radarsidoarjo.id | 031-5828 0826 | radarsidoarjo@gmail.com | Radar Sidoarjo | radarsidoarjo



#### ✓ Digitalisasi Digenjot...

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi di sektor layanan publik seperti puskesmas dan pasar tradisional. Menurutnya, pendampingan harus dilakukan secara rutin agar sistem non-tunai benar-benar diterapkan.  
"Saya tiap bulan akan tanya laporannya. Puskesmas ini sudah berapa persen non tunai. Pasar juga kita dampingi, karena di sana masih banyak transaksi manual," katanya.  
Selain itu, Subandi menargetkan optimalisasi retribusi pasar yang selama ini dinilai masih rendah. Digitalisasi diharapkan mampu menutup kekurangan Trans-

fer Kas Daerah (TKD) dari pusat yang mencapai sekitar Rp 646 miliar.  
"Kita tutupi dengan peningkatan PAD. Kalau ini dilakukan, saya yakin semua program akan jalan," ujarnya.  
Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Abridawati, berharap digitalisasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalkan kebocoran.  
"Mudah-mudahan ini betul-betul terwujud untuk meningkatkan PAD dan mengurangi kebocoran yang selama ini masih ada," ucapnya.  
Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Dra. Noer Rochmawati, M.Si.,

menjelaskan bahwa TP2DD merupakan tim lintas instansi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, OJK, hingga perbankan daerah.  
Ia menyebut, keberhasilan Sidoarjo meraih peringkat tiga nasional tak lepas dari kuatnya kolaborasi antar-OPD dalam mengembangkan sistem digital, termasuk aplikasi My Retribusi yang dibuat secara mandiri tanpa biaya dari APBD untuk pihak ketiga.  
"Yang dinilai itu bukan hanya jumlah digitalisasinya, tapi komitmen tim dalam mendorong implementasi. Tahun kemarin kita masif di retribusi dan hasilnya juara tiga nasional," jelasnya.  
Ia menambahkan, ke depan TP2DD

juga mulai mengkaji penerapan QRIS Tap atau pembayaran tanpa pindai barcode. Meski saat ini lebih banyak digunakan di sektor transportasi, peluang penerapannya di sektor retribusi daerah masih terus dipelajari.  
"QRIS Tap ini masih kita lihat potensinya. Kita sesuaikan dengan karakter wajib pajak dan retribusi di Sidoarjo," ujarnya.  
Di sisi lain, perwakilan dari Satgas P2DD dari Kemkenko Perekonomian RI, Alexcius Winang Bayu Seno, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh OPD dalam mendukung digitalisasi daerah.  
Menurutnya, selama ini pemahaman terkait TP2DD masih terpusat di BPPD, sehingga perlu dipertuas agar imple-

mentasi di lapangan lebih optimal.  
"Kami berharap pemahaman TP2DD tidak hanya di BPPD, tapi juga dimiliki seluruh OPD, sehingga digitalisasi tidak berjalan sendiri," jelasnya. (dik/vga)

Iklan Bans

### Delta Cekli

KEHILANGAN

KEHILANGAN STNK VARIO W-6024-NGE A/N MARIYO D/A TAMBAK SUMUR RT.01 RW.01 TAMBAK SUMUR WARU SIDOARJO

Pasang iklan cekli? Hub: 08133200182 (Imas)



KEPALA BIRU/PEMIMPIN REDAKSI: Vera Dwi Arieta STAF REDAKSI: Diky Putra Sanesi, Supripta LAYUTER: Satrio Adi PEMASANGAN: Agus KLAN: Budiana LANGGANAN: D...



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Pemerintah mulai menerapkan kebijakan WFH atau bekerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan bagi ASN setiap hari Jumat mulai pekan ini.

## WFH 1 Hari untuk ASN Mulai Diterapkan Pekan Ini **Pemerintah Disarankan Rutin Evaluasi Kebijakan**

■ Mendikti: PJJ  
dan WFH Dosen  
Jangan Ganggu  
Kualitas Belajar

Jakarta-HARIAN BANGSA

Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mengimbau implementasinya untuk sektor swasta, BUMN, dan BUMD.

Langkah strategis ini mulai berlaku efektif sejak 1 April 2026, menandai era baru dalam budaya kerja nasional. Kebijakan ini merupakan respons proaktif pemerintah terhadap berbagai tantangan, termasuk kebutuhan efisiensi energi nasional di tengah gejolak global. Pemberlakuan WFH satu hari dalam

❖ Bersambung ke Hal. 11

HARIAN  
**BANGSA**  
Koran Warga, JatiLim

## ● Pemerintah...

Sambungan dari halaman 1

seminggu ini didasari oleh Surat Edaran (SE) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ASN, serta SE Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk sektor swasta.

Tujuan utamanya adalah mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Selain efisiensi kerja, kebijakan WFH ini juga memiliki misi besar dalam penghematan energinasional, khususnya di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Dengan mengurangi mobilitas harian, pemerintah berharap dapat membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Kebijakan ini diharapkan menjadi pendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan efisiensi mobilitas secara menyeluruh.

Sementara pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah mengatakan, pemerintah tak perlu menunggu dua bulan untuk mengevaluasi kebijakan WFH. Menurut Lina, pemerintah tak perlu takut mengevaluasi jika memang di tengah perjalanan WFH dinilai tidak berdampak positif pada kinerja para aparatur sipil negara (ASN). "Bagi saya sebulan saja kay-

aknya sudah bisa (dievaluasi) tuh harusnya, berarti kan empat kali sudah (melaksanakan) WFH ya," kata Lina, Senin (6/4/2026).

Lina mengatakan, dalam empat minggu sudah bisa terlihat apakah kebijakan tersebut berdampak pada tujuan pemerintah, yakni mengurangi konsumsi energi, atau justru sebaliknya.

Selain itu, Lina juga mengusulkan agar pemerintah mulai membuka kanal pengaduan terkait dengan kebijakan tersebut. "Misalnya terkait dengan pelayanan publik, ternyata butuh pelayanan di hari Jumat tapi kemudian pelayanannya terganggu (karena WFH) dan segala macam," imbuhnya.

Langkah ini dinilai penting agar pemerintah bisa mencari informasi yang akurat dari masyarakat sehingga kemudian kebijakan ini tidak salah sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemilihan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan WFH. Kebijakan ini diterapkan dengan tetap menjaga layanan publik dan sektor strategis berjalan normal. Airlangga menyebutkan, hari Jumat dipilih karena beban kerja ASN relatif lebih ringan dibandingkan hari kerja lainnya. Aktivitas kerja pada hari tersebut dinilai tidak sepadat Senin hingga Kamis. "Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah (beban kerja). Artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis," kata Airlangga.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiknasaintek) Brian Yulianto tidak ingin kualitas pendidikan berkurang gara-gara dosen diberi WFH

1 hari, dan mahasiswa semester 5 ke atas melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Itu dengan mengatur perkuliahan sehingga lebih terkonsentrasi. Tentu sekali lagi ini tidak mengurangi capaian pembelajaran. Jangan sampai mengganggu kualitas pengajaran," kata Brian di Istana, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Agar kualitas belajar mahasiswa tidak berkurang maka pengaturan yang sesuai perlu diterapkan tanpa mengubah capaian pembelajaran yang sudah ditargetkan. Metode PJJ alias kuliah online dimungkinkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sudah digunakan di lingkungan kampus.

"Penggunaan digital, sehingga untuk pendaftaran, untuk aplikasi untuk ngecek transkrip dan lain sebagainya. Mobilitas mahasiswa itu bisa lebih sederhana karena semuanya digital, sehingga jauh lebih efisien. Kita juga meminta tugas-tugas itu sebisa mungkin digital sehingga misalnya tugas akhir yang dulu harus cetak 5 itu bisa dikurangi," ujar Brian.

Brian menekankan bahwa universitas tetap perlu memperhatikan mata kuliah yang bisa dilakukan pembelajaran secara hibrida (daring dan tatap muka). Yang pasti, Brian menegaskan, mahasiswa semester 1 dan 2 jangan sampai melakukan PJJ.

"Supaya atmosfer akademik itu terbangun dulu," ucap Brian.

Brian membeberkan ketentuan ini mulai berlaku pekan ini. Mata kuliah yang bisa dilakukan PJJ adalah pelajaran yang tidak perlu praktikum ataupun studio. (kcm/lip/lan)

## **EKONOMI**



Masyarakat saat antre membeli BBM subsidi di SPBU.

## **Pemerintah Tunggu Waktu yang Tepat Harga BBM Subsidi Belum Naik**

**Jakarta-HARIAN BANGSA**

Keputusan Presiden Prabowo Subianto tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah krisis energi global dinilai pengamat politik Nurul Fatta kental muatan politik.

❖ **Bersambung ke Hal. 11**

## ● Harga...

Sambungan dari halaman 1

BBM itu kan bukan sekadar komoditas ekonomi, tapi juga komoditas politik yang sensitif atau langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat,” katanya dikutip dari RMOL, Senin (6/4/2026).

Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga daya beli dan stabilitas sosial, karena kenaikan BBM hampir pasti akan berdampak pada inflasi dan bisa memicu gelombang protes. “Tapi di sisi

lain, kalau subsidi ini terus dipertahankan, beban fiskal negara juga akan semakin berat,” jelasnya.

Maka dari itu, Fatta memandang ini adalah bentuk tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Pemerintah pun tampaknya sedang menunda risiko politik dalam jangka pendek, sambil mencari momentum yang tepat untuk mengambil keputusan yang sebenarnya tidak populer.

“Pertanyaannya sekarang bukan apakah BBM akan naik atau tidak, tapi kapan waktu yang dianggap paling aman

secara politik untuk menaikkan harga itu? Karena cepat atau lambat, tekanan fiskal ini akan memaksa pemerintah mengambil keputusan,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut, harga BBM jenis RON90 Pertalite dan Solar masih bisa dipertahankan selama harga minyak mentah dunia tidak menembus 97 Dolar AS per barel.

“Pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite dan solar, harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai Desember 2026,” jelas Airlangga, Senin (6/4/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mempertahankan subsidi BBM hingga akhir tahun. “Saya ingin menegaskan bahwa subsidi terhadap BBM-BBM subsidi itu tidak akan dihilang, akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun,” tuturnya. (rmol/lan)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## KILAS DEWAN

### Bupati Sidoarjo Ucapkan Selamat atas Muscab PKB

#### Sidoarjo, Bhirawa

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan selamat atas terselenggaranya Muscab PKB Sidoarjo tahun 2026, Sabtu (4/4) akhir pekan lalu, yang digelar di Fave Hotel Sidoarjo.

Sebagai kepala daerah dirinya sangat mendukung, semoga berkah dan lancar. Karena harus diakui PKB di Kabupaten Sidoarjo, termasuk kekuatan politik yang strategis untuk mengawal jalannya pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

“Semoga Muscab PKB tahun 2026 ini dapat sebagai sarana sinergitas, antara Parpol dan Pemerintah, untuk membangun Kabupaten Sidoarjo semakin maju,” komentarnya, Senin (6/4) kemarin.

Menurutnya dalam acara Muscab PKB ini, tidak hanya sekedar memilih calon pemimpin PKB Sidoarjo di lingkungan internal saja, tetapi juga harus bisa melahirkan calon calon pemimpin, yang punya visi dan misi yang besar untuk memajukan Kabupaten Sidoarjo secara luas.

Dalam Muscab harus diakui pasti ada perbedaan pandangan. Dalam dunia organisasi perbedaan konsep itu biasa. Yang penting adalah tujuannya bisa untuk memajukan Kabupaten Sidoarjo.

“Kalau bersatu akan kuat, untuk membangun Sidoarjo,” ujarnya. Informasi yang diperoleh, ada 4 nama calon Ketua DPC PKB Sidoarjo yang ditetapkan oleh DPP PKB dalam Muscab PKB Sidoarjo tersebut. Diantaranya Abdilah Nasih, Usman, Riza Ali Faizin dan Ibnu Firdaus.

“Semoga lancar dan kondusif serta dapat melahirkan keputusan terbaik untuk masa depan Sidoarjo,” pungkasnya. [kus.dre]

## Senang Banyak Siswa Rasakan Manfaat MBG



Dr Tirto Adi

**KEPALA** Dikbud Kabupaten Sidoarjo, Dr Tirto Adi, mengatakan sampai saat ini sudah terdapat 117 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Ke depan, jumlah tersebut diharapkan akan bisa terus bertambah agar semakin banyak siswa di Kabupaten Sidoarjo yang dapat merasakan manfaat program nasional MBG tersebut.

Sejauh ini dari

▶▶ ke halaman 11



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Senang Banyak Siswa Rasakan Manfaat MBG

### ● Sambungan hal 1

laporan yang ia terima, tidak ada keluhan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program MBG. Hal tersebut menurutnya, karena menu-menu yang disajikan oleh tim SPPG telah sesuai dengan standar gizi dan dapat diterima oleh siswa.

“Saya sempat menanyakan langsung kepada pengelola SPPG, apakah ada keluhan dari sekolah, seperti anak-anak tidak mau makan. Ternyata tidak ada, artinya menu yang disajikan sudah sesuai dan memenuhi standar gizi,” komentar Tirto, belum lama ini, ikut mendampingi Wabup Sidoarjo Mimik Idayana, yang melakukan Sidak ke SPPG yang berada di Desa Kepuhkemiri Kecamatan Tulangan.

Laporan yang ia dapat dari Dinas Kesehatan Sidoarjo, SPPG di Desa Kepuh Kemiri itu masih dalam proses pengurusan di Dinas Kesehatan Sidoarjo, untuk bisa mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Syarat ini menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap SPPG.

Sertifikat tersebut akan diterbitkan setelah seluruh aspek pengelolaan memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan kesehatan.

Tim dari Dinkes Sidoarjo saat ini masih dalam proses pemeriksaan mulai dari peralatan, sampel makanan, hingga penjamah makanan yang harus mendapatkan pelatihan. Selain itu, hasil uji laboratorium juga harus dilengkapi.

“Jika semua persyaratan terpenuhi, maka SLHS akan diterbitkan,” ujar mantan Kepala Sekolah SMPN 3 Sidoarjo itu.

Menurut Tirto Adi, setelah pihaknya berkoordinasi dengan koordinator wilayah MBG di Kabupaten Sidoarjo, Insyaallah dalam waktu dekat akan ada penambahan SPPG lagi di Kabupaten Sidoarjo. [kus.gat]



Pemerintah

## Bayar Cukup Tempel HP, Sidoarjo Siap Terapkan QRIS Tap

Media Sorot Mata 6 April 2026



**SIDOARJO, MEDIASOROTMATA.COM** – Pemkab Sidoarjo perkuat komitmen terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Sidoarjo terus berinovasi untuk mempercepat dan memperluas implementasi ETPD. Hasilnya tahun 2025 kemarin TP2DD Kabupaten Sidoarjo mendapat apresiasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. TP2DD Kabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai TP2DD terbaik III Wilayah Jawa-Bali.

Tahun 2026 ini komitmen terhadap ETPD diwujudkan dengan rencana penerapan QRIS Tap disetiap transaksi keuangan. Mode transaksi keuangan dari tunai menjadi non-tunai tersebut lebih cepat, praktis dan aman. QRIS Tap akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran digital tanpa harus memindai atau scan barcode melalui kamera ponsel. Transaksi pembayaran cukup dengan menempelkan HP ke mesin EDC/pembaca contactless.

Pagi tadi, TP2DD Kabupaten Sidoarjo menggelar High Level Meeting di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4/2026). Kegiatan tersebut digunakan untuk mengevaluasi Championship TP2DD 2025 serta mempersiapkan pengisian Championship TP2DD 2026. Selain itu kegiatan yang dibuka Bupati Sidoarjo H. Subandi tersebut juga digunakan untuk mensosialisasikan pemanfaatan QRIS Tap. Analis Kebijakan Ahli Muda serta Analis Perekonomian dari Kementerian Koordinator Bidang perekonomian dihadirkan sebagai narasumber pada kegiatan tersebut.

Selain itu juga dihadirkan narasumber dari Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Kantor Perwakilan BI Jawa Timur.

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan forum HLM ini bukanlah sekadar rapat koordinasi rutin. Namun menjadi forum strategis di tingkat pimpinan untuk menyamakan langkah, membongkar sumbatan yang ada, dan mengeksekusi komitmen bersama terhadap ETPD.

“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kita secara terukur,” ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo yang telah berhasil menduduki peringkat ke-3 TP2DD Terbaik wilayah Jawa-Bali. Selain itu inovasi pembayaran retribusi secara non tunai milik Pemkab Sidoarjo juga dinobatkan sebagai Program Unggulan Terbaik ke-3 nasional oleh Menko Bidang Perekonomian RI. Kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo tersebut mampu menaikkan ETPD Kabupaten

Sidoarjo menjadi 99,5%. Angka itu menjadi yang tertinggi se-Provinsi Jawa Timur pada Semester 2 Tahun 2025.

“Capaian ini adalah buah dari kerja keras saudara-saudara sekalian, anggota Tim Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.



# INFO MEDIA PERS

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



SIDOARJO, [MEDIASOROTMATA.COM](https://mediasorotmata.com) – Pemkab Sidoarjo perkuat komitmen terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kabupaten Sidoarjo terus berinovasi untuk mempercepat dan memperluas implementasi ETPD. Hasilnya tahun 2025 kemarin TP2DD Kabupaten Sidoarjo mendapat apresiasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. TP2DD Kabupaten Sidoarjo dinobatkan sebagai TP2DD terbaik III Wilayah Jawa-Bali.

Tahun 2026 ini komitmen terhadap ETPD diwujudkan dengan rencana penerapan QRIS Tap disetiap transaksi keuangan. Mode transaksi keuangan dari tunai menjadi non-tunai tersebut lebih cepat, praktis dan aman. QRIS Tap akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran digital tanpa harus memindai atau scan barcode melalui kamera ponsel. Transaksi pembayaran cukup dengan menempelkan HP ke mesin EDC/pembaca contactless.

Pagi tadi, TP2DD Kabupaten Sidoarjo menggelar High Level Meeting di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4/2026). Kegiatan tersebut digunakan untuk mengevaluasi Championship TP2DD 2025 serta mempersiapkan pengisian Championship TP2DD 2026. Selain itu kegiatan yang dibuka Bupati Sidoarjo H. Subandi tersebut juga digunakan untuk mensosialisasikan pemanfaatan QRIS Tap. Analisis Kebijakan Ahli Muda serta Analisis Perekonomian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dihadirkan sebagai narasumber pada kegiatan tersebut.

Selain itu juga dihadirkan narasumber dari Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Kantor Perwakilan BI Jawa Timur.

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan forum HLM ini bukanlah sekadar rapat koordinasi rutin. Namun menjadi forum strategis di tingkat pimpinan untuk menyamakan langkah, membongkar sumbatan yang ada, dan mengeksekusi komitmen bersama terhadap ETPD.

“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kita secara terukur,” ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo yang telah berhasil menduduki peringkat ke-3 TP2DD Terbaik wilayah Jawa-Bali. Selain itu inovasi pembayaran retribusi secara non tunai milik Pemkab Sidoarjo juga dinobatkan sebagai Program Unggulan Terbaik ke-3 nasional oleh Menko Bidang Perekonomian RI. Kinerja TP2DD Kabupaten Sidoarjo tersebut mampu menaikkan ETPD Kabupaten

Sidoarjo menjadi 99,5%. Angka itu menjadi yang tertinggi se-Provinsi Jawa Timur pada Semester 2 Tahun 2025.

“Capaian ini adalah buah dari kerja keras saudara-saudara sekalian, anggota Tim Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.

Bupati Sidoarjo H. Subandi akan terus mendorong implementasi ETPD di Kabupaten Sidoarjo. Ia meminta transaksi keuangan secara digital dapat dilakukan diberbagai sektor. Baik disektor perdagangan maupun kesehatan. Ia yakin dengan percepatan dan perluasan transaksi keuangan digital akan mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saat ini retribusi pasar sangat kecil, coba ETPD kita implementasi pada pasar-pasar yang ada, bikinkan aplikasi yang kira-kira masyarakat yang tidak bisa IT cukup dengan HP bisa melakukan pembayaran non tunai,” pintanya.

Sementara itu Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati selaku Ketua Harian TP2DD Kabupaten Sidoarjo mengatakan komitmen implementasi ETPD akan dikuatkan melalui penerapan QRIS Tap. Semua OPD diharapkan segera menerapkan QRIS Tap dalam meningkatkan PAD maupun belanja daerah. Menurutnya hal tersebut tidaklah sulit bagi semua OPD.

“Non tunai (pembayaran) ini terbukti liner dengan pembangunan-pembangunan yang lain, terbukti Indeks Pembangunan Manusia kita tertinggi se Jawa Timur untuk kabupaten dengan angka 83,35,” ucapnya.

Fenny menyampaikan bahwa saat ini pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sidoarjo tertinggi se-Jawa Timur. Capain tersebut juga tercatat sebagai yang tertinggi ke 4 Nasional. Menurutnya peningkatan pendapatan daerah tidak terlepas dari digitalisasi daerah. Pemkab Sidoarjo juga melibatkan infrastruktur perbankan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

“Kita juga memiliki pondasi infrastruktur digital yang matang yang siap mendukung implementasi berbagai jenis transaksi digital,” ucapnya. (NURI)

Tags: [Bayar Cukup Tempel HP](#)

[Sidoarjo Siap Terapkan QRIS Tap](#)



## Empat Kandidat Ketua PKB Sidoarjo Bakal Jalani Tes Akademik dan Psikologi di UM Malang

Imam Hambali  
Selasa, 07 Apr 2026 02:51 WIB



Empat orang kandidat Ketua DPC PKB Sidoarjo telah ditetapkan dan akan berprofesi sehingga terpilih.

**Sidoarjo, JatimUpdate.id** – Empat kandidat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo hasil Musyawarah Cabang (Muscab) VI akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi berupa tes akademik dan psikologi yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang (UM).



Bendahara DPW PKB Jawa Timur, Mochammad Sholichul Umam, mengatakan pelaksanaan tes dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 11 April 2026.

"InsyaAllah tanggal 10 dan 11 April 2026 di Universitas Negeri Malang," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

Adapun empat nama kandidat Ketua DPC PKB Sidoarjo periode 2026–2031 yakni Abdillah Nasih, Rizza Ali Faizin, Usman, dan Ibnu Azzar Firdaus.

Keempat nama tersebut merupakan hasil pemetaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPW PKB yang kemudian diumumkan dalam Muscab VI PKB Sidoarjo di Fave Hotel pada Sabtu (4/4/2026).



Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Thoriqul Haq, menjelaskan mekanisme Muscab kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Proses penentuan kepemimpinan dilakukan melalui pemetaan oleh DPP dan DPW.



# INFO MEDIA PERS

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	NOMOR KTA	LATAR BELAKANG
1.	H. Abdullah Nasih	3515102023000001	Ketua DPC, Ketua DPRD Sidoarjo
2.	H. Rizza Ali Faizin, M.Pd.I.	3515092004000004	Anggota F-PKB DPRD Sidoarjo
3.	H. Usman, M.Kes.	3515172003000001	Anggota F-PKB DPRD Sidoarjo
4.	Ibbnu Azzar Firdaus	3515182011000001	Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Surabaya, 6 Maret 2026

TIM PENATAAN STRUKTUR DPC PKB  
MASA BAKTI 2026-2031

Empat orang kandidat Ketua DPC PKB Sidoarjo telah ditetapkan dan akan berprofesi sehingga terpilih.

**Sidoarjo, JatimUpdate.id** – Empat kandidat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo hasil Musyawarah Cabang (Muscab) VI akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi berupa tes akademik dan psikologi yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang (UM).



Minggu, 05 Apr 2026 22:31 WIB

**Pilkada Mendatang: DPP Beri Lampu Hijau PKB Surabaya Usung Calon Sendiri**

Bendahara DPW PKB Jawa Timur, Mochammad Sholichul Umam, mengatakan pelaksanaan tes dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 11 April 2026.

“InsyaAllah tanggal 10 dan 11 April 2026 di Universitas Negeri Malang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

Adapun empat nama kandidat Ketua DPC PKB Sidoarjo periode 2026-2031 yakni Abdullah Nasih, Rizza Ali Faizin, Usman, dan Ibbnu Azzar Firdaus.

Keempat nama tersebut merupakan hasil pemetaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPW PKB yang kemudian diumumkan dalam Muscab VI PKB Sidoarjo di Fave Hotel pada Sabtu (4/4/2026).



Minggu, 05 Apr 2026 19:43 WIB

**Sekjen Hasanuddin: Rugi PKB Tak Menang di Surabaya, Punya Ketua DPRD Jatim**

Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Thoriqul Haq, menjelaskan mekanisme Muscab kali ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Proses penentuan kepemimpinan dilakukan melalui pemetaan oleh DPP dan DPW.

Meski demikian, para kandidat akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang dilengkapi dengan uji kelayakan dan kepatutan, yakni wawancara oleh DPP PKB.

“Ada tes psikologi, tes akademik, dan tes wawancara. Semua pemberkasan itu dalam kontrol DPP PKB, Ketua Umum, dan Sekjen,” kata Thoriqul Haq saat sambutan di Muscab PKB Sidoarjo.



Minggu, 05 Apr 2026 07:10 WIB

**Muscab VI PKB Sidoarjo Digelar, Usulkan Empat Calon Ketua Baru**

Hasanuddin Wahid, Sekretaris Jenderal DPP PKB, menyatakan para kandidat akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan melalui wawancara di DPP. Dalam proses tersebut, kemampuan serta visi para kandidat akan diuji, lalu dilanjutkan dengan penelusuran rekam jejak.

“Yang penting mencari pemimpin (pengurus) PKB Sidoarjo yang mau ngurus, bukan menjadi urusan,” tegas Cak Udin sapaan akrabnya.(ih/yh)

Editor : **Yuris. T. Hidayat**

Aktifkan Notifikasi Info Terbaru

PKB Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo



# Kampung Kampung Ikonik Sidoarjo (6): Kampung Tas Tanggulangin, INTAKO jadi Satu-satunya Tumpuan

ik  
t  
nt  
jai  
/S

Reporter: [Amelia Puspa Ningrum\\*](#) | Editor: [Guruh Dimas Nugraha](#) |  
Senin 06-04-2026,07:00 WIB



INTAKO, koperasi perajin tas dan koper di kawasan Tanggulangin. INTAKO mencapai kejayaannya pada dekade '80an.-Najwa Rana Iswari-Harian Disway

**Tanggulangin** pernah memiliki nama besar. Dikenal sebagai kawasan pusat industri tas. Tak pernah sepi. Tapi setelah kejadian Lumpur Lapindo dan pandemi, eksistensinya meredup. Para perajin sebagian besar bertahan melalui koperasi INTAKO.

k

Koperasi INTAKO di Tanggulangin berdiri sejak 1976. Meski meredup, sampai kini aktivitas karyawan masih ada.

i

Pun, pesanan-pesanan dari customer. Kegiatan lainnya yang masih aktif adalah kunjungan studi. Baik dari berbagai sekolah maupun universitas.

1

Saat Harian Disway berkunjung pada 3 Februari 2026, tampak gedung tua INTAKO tersebut. Cat dindingnya mengelupas.

li

**BACA JUGA:**[Kampung-Kampung Ikonik Sidoarjo \(5\): Kampung Batik Jetis Tunggu Waktu Menuju Puncak](#)

**BACA JUGA:**[Kampung-Kampung Ikonik Sidoarjo \(4\): Kampung Batik Jetis, Hidup Segan Mati Enggan](#)



mengelupas.

**BACA JUGA:**[Kampung-Kampung Ikonik Sidoarjo \(5\):  
Kampung Batik Jetis Tunggu Waktu Menuju Puncak](#)

**BACA JUGA:**[Kampung-Kampung Ikonik Sidoarjo \(4\):  
Kampung Batik Jetis, Hidup Segan Mati Enggan](#)



Koper berbahan kulit yang ada di INTAKO. Koperasi itu hingga kini masih menerima order meski hasilnya tak sebaik dulu.-Najwa Rana Iswari-Harian Disway

Papan namanya telah usang. Tapi gedung itu yang jadi tumpuan harapan warga Tanggulangin. Utamanya para perajin tas dan koper.

INTAKO merupakan singkatan dari Industri Tas dan Koper. Keberadaannya diinisiasi oleh tujuh perajin tas. Saat itu, mereka sepakat membentuk koperasi.

Lokasinya ada di Desa Kedensari, Tanggulangin. Dari INTAKO, Tanggulangin perlahan tumbuh. Lalu dikenal menjadi sentra tas kulit.

"Dulu orang cari tas pasti ke Tanggulangin. Ke INTAKO," kata Zainul Arifin, Ketua Koperasi Intako periode 2024-2026.

**BACA JUGA:**[Kampung-Kampung Ikonik Sidoarjo \(3\):  
Kampung Batik Jetis, Canting Punya Nilai Seni](#)

**BACA JUGA:**[Kampung-Kampung Ikonik Sidoarjo \(2\):  
Kampung Batik Jetis, Musala Tiap Gang dan Jejak Dakwah Islam](#)

Puncak kejayaan INTAKO terjadi pada 1980-an. Saat itu, mereka dipercaya mengerjakan tas koper jamaah haji. Ordernya berasal dari maskapai Garuda Indonesia.

Bahkan, mereka juga membuat tas alat musik Yamaha Jepang. Dipasarkan ke berbagai negara. Kala itu, gedung INTAKO selalu ramai. Setiap hari ada transaksi. Pembeli dan tamu yang datang silih berganti.

Waktu berjalan cepat. Tahun 2006, terjadi bencana Lumpur Lapindo. Kunjungan tamu ke INTAKO turun drastis.

Menurut Zainul, Lumpur Lapindo tidak sampai ke Desa Kedensari. Hanya baunya saja. Aroma tidak sedap tentu mengganggu kenyamanan pengunjung. Ditambah berita hoaks yang beredar kala itu. Semakin membuat orang enggan datang.



Produk tas yang disajikan di INTAKO. Tas-tas tersebut merupakan buah tangan dari para perajin di Tanggulangin.-Najwa Rana Iswari-Harian Disway

**BACA JUGA:**[Kampung-Kampung Ikonik Sidoarjo \(1\): Kampung Batik Jetis, Pebatik Muda Tinggal Satu-satunya](#)

**BACA JUGA:**[Kampung Sukolilo Guyub Selenggarakan Tradisi Kupatan 7 Syawal, Yang Sedang Lewat Juga Ikut Rebutan](#)

Belum pulih sepenuhnya. Tahun 2020, terjadi pandemi COVID-19. Semua aktivitas di INTAKO berhenti total. Tidak ada kunjungan.

Tidak ada pesanan dari intansi-intansi yang selama ini mereka andalkan. "Kami betul-betul sangat tertekan. Sama sekali tak ada pemasukan," ujar pria 52 tahun itu.

Saat itu, kondisi pasar berubah. Terlebih adanya tren belanja *online*. Banyak perajin tas dan pelaku UMKM Tanggulangin yang tidak bisa mengikuti tren dan teknologi. Pun, keterbatasan modal jadi masalah besar.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Belum pulih sepenuhnya. Tahun 2020, terjadi pandemi COVID-19. Semua aktivitas di INTAKO berhenti total. Tidak ada kunjungan.

Tidak ada pesanan dari instansi-instansi yang selama ini mereka andalkan. "Kami betul-betul sangat tertekan. Sama sekali tak ada pemasukan," ujar pria 52 tahun itu.

Saat itu, kondisi pasar berubah. Terlebih adanya tren belanja *online*. Banyak perajin tas dan pelaku UMKM Tanggulangin yang tidak bisa mengikuti tren dan teknologi. Pun, keterbatasan modal jadi masalah besar.

Namun, menurut Zainul, sebagian besar tas yang laku di toko *online* itu diproduksi di Tanggulangin. "Yang jual *online* itu cuma memasarkan saja. Bantu jual. Produksinya tetap di sini," ujarnya.

**BACA JUGA:**[Mengakar untuk Tumbuh, Mbangunredjo Art Festival Suguahkan Performance Art di Jalanan Kampung](#)

**BACA JUGA:**[Rayakan Imlek 2026, Kampung Tambak Bayan Sajikan Penampilan Tari Lintas Budaya](#)

Saat ini, anggota koperasi INTAKO berjumlah 200. Jumlah itu lebih sedikit daripada dulu. Saat masa jaya, anggota INTAKO mencapai 300 lebih.

Hal itu disebabkan karena banyak perajin tas yang berhenti. Ada yang karena usia. Lalu anak-anak mereka tak meneruskan usaha. Ada yang pemasukan tak cukup. Kalah dengan biaya produksi yang tinggi. Dan berbagai masalah lainnya.

Dari sisi karyawan, jumlahnya saat ini hanya 20 orang. Dulu, dekade '80an, sampai 80 orang. Tugasnya beragam.

Seperti melayani pembeli, mengatur stok, hingga menyiapkan pesanan-pesanan dari berbagai customer atau instansi. Mereka bekerja sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore.

### **BACA JUGA:Kampung Pecinan Tambak Bayan Bersolek Sambut Imlek 2026, Susun Lini Masa Autentik**

### **BACA JUGA:Masjid Wal Adhuna Jadi Saksi Bisu Tenggelamnya Kampung Nelayan di Muara Baru**

Di belakang pintu masuk gedung itu ada setumpuk box barang. Siap dikirim ke Malang. Order dari sebuah perusahaan, langganan lama INTAKO.

Bahan yang digunakan adalah *dolby double* yang anti air. Dilengkapi karet bagian dalamnya. Harga satuannya dibanderol Rp500 ribu.

Harian Disway berbincang dengan dua orang pegawai, Abidatul Fitria dan Nina Yuliani. Abidah bercerita mengenai sepihnya order. Meski promosi sudah giat dilakukan melalui media sosial.

Nina Yuliani pun sempat membagikan ceritanya. Anaknya yang pertama saat ini baru masuk kuliah di Surabaya.

### **BACA JUGA:Jeritan Kampung Dupak Bangunrejo Lewat Drama Monolog Sangkan Paran: Jantung Tanpa Hati**

### **BACA JUGA:Gerakan Kebudayaan Kampung Bangunrejo**

Penghasilan yang didapatkan salah satunya untuk membiayai kuliah tersebut. Mereka berdua warga asli Desa Kedensari, Tanggulangin. Setiap hari mereka mencari rezeki melalui koperasi yang kritis itu.

Kisah lain datang dari Wawan Karyawan, anggota aktif koperasi INTAKO. Saat ditemui pada 10 Februari 2026, Wawan menyebut bahwa ia sudah lama menitipkan produknya di INTAKO. Tepatnya sejak awal tahun 2000.

Wawan mengaku omsetnya turun tajam. "Dulu sebelum bencana Lumpur Lapindo, total barang yang bisa dijual mencapai Rp150 juta. Lalu menurun tajam. Setelah pandemi malah makin turun lagi. Bisa sampai 80 persen," keluhnya.

Meski begitu, sampai saat ini ia masih menitipkan produknya. Tidak banyak. Kalau dihitung hanya empat sampai lima tas.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Reporter: Amelia Puspa Ningrum\* | Editor: Guruh Dimas Nugraha |  
Senin 06-04-2026,07:00 WIB



INTAKO, koperasi perajin tas dan koper di kawasan Tanggulangin. INTAKO mencapai kejayaannya pada dekade '80an.-Najwa Rana Iswari-Harian Disway

Koperasi Intako masih menyimpan beragam produk khas kulit. Di bagian depan, terdapat ruang tas kulit premium.

Itulah produk yang sejak lama jadi ciri khas Tanggulangin. Di belakang, tersusun koper, jaket, sepatu, hingga barang lain yang menunggu pembeli.

Barang-barang di Koperasi INTAKO berasal dari anggota koperasi yang merupakan perajin. Dari 200 anggota, hanya sebagian yang masih aktif dan produktif. Rutin menitipkan barang.

Rak bagian depan koperasi itu beberapa terisi penuh. Namun, bagian belakangnya tampak lengang. Barang lama jadi satu dengan wadah-wadah kecil.

**BACA JUGA:**[CULIT 2025 Angkat Lagi Isu Sengketa Tanah di Kampung Pecinan Tambak Bayan Surabaya](#)

**BACA JUGA:**[CULIT 2025 Ungkap Seni, Sejarah, dan Budaya di Kampung Pecinan Tambak Bayan Surabaya](#)

Wadah untuk menampung tetesan air hujan dari atap yang bocor. INTAKO masih cukup eksis. Meski tersengal-sengal. (\*)

*\*) Mereka yang masih bertahan, baca seri selanjutnya...*

*\*) Peserta MagangHub Kemnaker RI.*